

INTISARI

Pedagang kaki lima merupakan kelompok pekerja yang pada dasarnya tidak memiliki standar pendidikan untuk bekerja dan jam kerja serta identik dengan penggunaan ruang publik sebagai tempat untuk melakukan aktivitas berjualannya. Penataan pedagang kaki lima menjadi penting dilakukan untuk mengatur pedagang kaki lima berjualan di tempat yang ditetapkan sehingga kesempatan mereka untuk berjualan tetap diberikan dan di satu sisi pemerintah melindungi fungsi utama ruang publik.

Tesis ini berjudul Kinerja Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab masih belum maksimalnya pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Sintang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan, wawancara dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dan pedagang kaki lima di Kecamatan Sintang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Sintang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang yang belum maksimal, dipengaruhi oleh pelaksanaan yang tidak efektif dan kurangnya responsivitas dari pedagang kaki lima di Kecamatan Sintang. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus melakukan negosiasi sebelum relokasi dilaksanakan dan melakukan pengawasan, penertiban dan penegakan sanksi sesuai dengan isi peraturan penataan pedagang kaki lima serta memberikan kepastian status pedagang kaki lima Kecamatan Sintang.

Kata kunci: Kinerja, Perda, PKL

ABSTRACT

Street hawkers are groups of workers who basically do not have education standards for working and working hours and are identical to the use of public space as a place to carry out their trading activities. The arrangement of street vendors becomes important to be done to regulate street vendors selling in designated places so that their opportunities to sell are still given and on the one hand the government protects the main function of public space.

This thesis is entitled The Performance of Sintang District Regulation Number 9 of 2011 concerning the Arrangement of Street Vendors in Sintang District. The purpose of this study was to determine the causes of the still not maximizing the arrangement of street vendors in Sintang District. This study used descriptive qualitative method. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were processed from observations, interviews with the Sintang District Office of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs, the Sintang District Civil Service Police Unit and street vendors in Sintang District. Whereas secondary data was obtained from documents related to the implementation of the arrangement of street vendors in Sintang District.

The results showed that the performance of the implementation of the Regional Regulation of Sintang District Number 9 of 2011 concerning the Arrangement of Street Vendors in Sintang District was not yet maximal, influenced by ineffective implementation and the lack of responsiveness of street vendors in Sintang District. In this case, the regional government must negotiate before the relocation is carried out and conduct supervision, control and enforcement of sanctions in accordance with the contents of the regulation of the arrangement of street vendors and provide certainty of the status of street vendors in Sintang District.

Keywords: Performance, local regulation, Street vendors